

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi perekonomian mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pemerintah daerah memiliki kewenangan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu mengatur Penyelenggaraan Jalan Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Cara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
9. KP2SP-PM adalah Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal.
10. Status jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan daerah dan jalan desa.
11. Fungsi jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan.
12. Kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
14. Jalan nasional adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
15. Jalan provinsi adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
16. Jalan daerah adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Jalan desa adalah jalan lingkungan primer/sekunder dan jalan lokal primer/sekunder yang tidak termasuk dalam jalan daerah dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa.
18. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
19. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
20. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
21. Pembangunan jalan adalah kegiatan memprogram dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
22. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
23. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
24. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki.
25. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
26. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
27. Jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
28. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.

29. Nama jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan.
30. Ruang milik jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Izin pemanfaatan ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemanfaatan Rumija daerah untuk suatu kegiatan usaha melalui jalan masuk ke pekarangan perusahaan, penanaman utilitas umum, penempatan papan reklame/billboard (baik di dalam maupun di luar tanah) serta penggunaan ruang milik jalan lainnya yang bersifat komersial.
32. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
33. Jumlah berat yang diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
34. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan daerah berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan jalan daerah bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan;
- b. mendukung terwujudnya keserasian antara jalan desa dengan jalan daerah, serta antar daerah dan antar kawasan;
- c. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan daerah dan desa;
- d. mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dalam pembinaan jalan;
- e. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
- f. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

BAB III PENGELOLAAN JALAN DESA

Bagian Kesatu Kriteria Jalan Desa

Pasal 4

- (1) Jalan desa menurut fungsinya terdiri dari jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Jalan lokal desa adalah jalan desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 4 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 10 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 6 meter dari tepi badan jalan.
- (3) Jalan lingkungan desa adalah jalan desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 3 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 9 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 5 meter dari tepi badan jalan.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 5

- (1) Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
- (2) Pemerintah daerah harus melibatkan peran serta pemerintah desa dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peran serta pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. masukan, saran dan usulan;
 - b. tugas pembantuan sebagian urusan pemerintah daerah;
 - c. pelaksanaan sebagian urusan pemerintah daerah yang pengaturannya diserahkan kepada pemerintah desa.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah desa berhak :
 - a. memberikan masukan, saran, usulan dan informasi mengenai penyelenggaraan jalan desa kepada pemerintah daerah;
 - b. mendapatkan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah daerah;
 - c. mendapatkan pedoman pelaksanaan pengaturan urusan pemerintah daerah yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.
- (2) Pemerintah desa berkewajiban :
 - a. melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan desa;
 - b. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan desa: pembersihan semak, pemotongan rumput, pembersihan bahu jalan, pembersihan saluran dan pembersihan gorong-gorong; dan
 - c. mengatur dan mengendalikan fungsi serta tata tertib pemanfaatan jalan desa.

Bagian Keempat
Perencanaan dan Pembinaan Jalan Desa

Pasal 7

- (1) Perencanaan jalan desa disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan jalan daerah.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jalan desa, pemerintah daerah melibatkan partisipasi pemerintah desa .

Pasal 8

- (1) Pembina jalan desa adalah pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan jalan desa oleh pemerintah daerah melibatkan partisipasi pemerintah desa.

Bagian Kelima
Pembangunan Jalan Desa

Pasal 9

- (1) Pembangunan jalan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Dalam hal pemerintah desa tidak memiliki dana untuk pembangunan jalan desa atau dana yang tersedia diperuntukkan bagi pembangunan jalan desa dengan skala prioritas yang lebih tinggi, maka pemerintah desa dapat mengajukan permohonan bantuan dana pembangunan jalan desa kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat termasuk sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

**Bagian Keenam
Pengawasan Jalan Desa**

Pasal 10

- (1) Pengawasan jalan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
PENGELOLAAN JALAN DAERAH**

**Bagian Kesatu
Penyelenggara**

Pasal 11

Penyelenggara jalan daerah adalah pemerintah daerah.

**Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah**

Pasal 12

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

**Bagian Ketiga
Pengaturan Jalan Daerah**

Pasal 13

- Pengaturan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan daerah berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
 - b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan daerah;
 - c. penetapan status jalan daerah; dan
 - d. penyusunan perencanaan jaringan jalan daerah.

**Bagian Keempat
Pembina Jalan Daerah**

Pasal 14

- (1) Pembina jalan daerah adalah pemerintah daerah.
- (2) Pembina jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :
 - a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelenggara jalan daerah;
 - b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan daerah.

**Bagian Kelima
Pembangunan Jalan Daerah**

Pasal 15

- Pembangunan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :
- a. perencanaan teknis, penganggaran, pengadaan tanah, serta pelaksanaan konstruksi jalan daerah;
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan daerah; dan
 - c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan daerah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan dana untuk pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan daerah.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemerintah daerah wajib mengusahakan dana pemeliharaan dan perbaikan jalan daerah dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keenam Pengawasan Jalan Daerah

Pasal 17

Pengawasan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :

- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan daerah; dan
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan daerah.

BAB V KEWAJIBAN KEPEMILIKAN IZIN

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan Rumija diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemanfaatan Rumija untuk keperluan rumah tangga, instansi pemerintah dan sarana umum lainnya.

Pasal 19

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberikan oleh Bupati selaku pembina jalan melalui pengadministrasian SKPD terkait.

Pasal 20

- (1) Subjek retribusi izin pemanfaatan Rumija adalah setiap orang yang memanfaatkan Rumija di daerah.
- (2) Objek retribusi izin pemanfaatan Rumija adalah Rumija yang dimanfaatkan untuk keperluan kegiatan usaha.

Pasal 21

- (1) Izin diberikan kepada perorangan dan badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Permohonan izin dilakukan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang perizinan.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pemegang izin wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat izin.

Pasal 23

Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

Pasal 24

Jangka waktu izin berlaku selama perusahaan berjalan dan tidak ada perubahan jenis dan/atau kegiatan usaha.

Pasal 25

Masa berlaku izin berakhir karena:

- a. Dikembalikan oleh pemegang izin karena kegiatan usaha terhenti/tidak dilanjutkan;
- b. Pemegang izin meninggal dunia;
- c. Dibatalkan dan/atau dicabut karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pemegang izin memindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 26

Kepada setiap pemegang izin dikenakan retribusi.

BAB VI PERAN DAN BAGIAN-BAGIAN JALAN DAERAH

Bagian Kesatu Peran Jalan Daerah

Pasal 27

Peran jalan daerah adalah :

- a. Prasarana distribusi barang dan jasa;
- b. Penghubung ibukota daerah dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, Ibukota daerah dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta tempat-tempat lainnya yang dapat dimanfaatkan secara penuh untuk kepentingan pada huruf a, serta dapat mendorong pengembangan wilayah dalam daerah; dan
- c. Merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Bagian-Bagian Jalan Daerah

Pasal 28

- (1) Bagian-bagian jalan daerah meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I, II, III dan IV Peraturan Daerah ini.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
- (3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Bagian Jalan Daerah

Pasal 29

- (1) Badan jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Saluran tepi jalan diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (3) Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- (4) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

- (5) Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan, serta pengamanan fungsi jalan.

**Bagian Keempat
Leger Jalan**

Pasal 30

- (1) Penyelenggara jalan daerah wajib mengadakan leger jalan daerah yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan.
- (3) Leger jalan daerah sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut :
 - a. identitas jalan;
 - b. peta lokasi ruas jalan; dan
 - c. data ruang milik jalan.
- (4) Leger jalan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII
STATUS JALAN DAERAH**

**Bagian Kesatu
Kriteria Status Jalan Daerah**

Pasal 31

- (1) Jalan daerah menurut fungsinya terdiri dari jalan kolektor, jalan lokal dan jalan strategis.
- (2) Jalan kolektor adalah jalan daerah yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 6 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 12 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 6 meter dari tepi badan jalan.
- (3) Jalan lokal adalah jalan daerah yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 5 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 11 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 7 meter dari tepi badan jalan.
- (4) Jalan strategis adalah jalan selain jalan kolektor dan jalan lokal yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, keamanan daerah, ketahanan jaringan jalan daerah dan kesinambungan jaringan jalan daerah.

**Bagian Kedua
Mekanisme dan Tata Cara Penetapan Status Jalan Daerah**

Pasal 32

- (1) Status jalan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Status jalan suatu ruas jalan daerah dapat berubah setelah perubahan fungsi jalan dengan diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila :
 - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
 - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;

- c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
 - d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (4) Penyelenggara jalan yang menyetujui usulan perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan status ruas jalan tersebut dengan memperhatikan bahwa penyelenggara jalan sebelumnya tetap bertanggungjawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.
- (5) Usulan perubahan fungsi dan status jalan harus mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

BAB VIII PENETAPAN KELAS JALAN

Bagian Kesatu Mekanisme Penetapan Kelas Jalan

Pasal 33

- (1) Penetapan kelas jalan berdasarkan karakteristik kendaraan bermotor serta daya dukung jalan untuk menerima muatan sumbu terberat.
- (2) Penetapan dan/atau perubahan kelas jalan daerah dan jalan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Spesifikasi Kelas Jalan

Pasal 34

- (1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari :
- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter dan muatan sumbu terberat 10 ton;
 - b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton; dan
 - c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton.
- (2) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton.

Bagian Ketiga Pembatasan Penggunaan Jalan

Pasal 35

- (1) Penetapan kelas jalan wajib dinyatakan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang dipasang pada ruas jalan.
- (2) Setiap orang dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui jalan daerah dan jalan desa yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang diizinkan oleh kendaraan tersebut.
- (3) Perbaikan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pelaku pelanggaran.

BAB IX
PEMBERIAN NAMA JALAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Nama Jalan Daerah

Pasal 36

- (1) Setiap jalan daerah memiliki nama jalan.
- (2) Satu nama jalan tidak boleh digunakan untuk lebih dari satu jalan.

Pasal 37

- (1) Nama jalan untuk jalan protokol dan jalan utama menggunakan nama Pahlawan Nasional atau nama orang yang telah menjadi tokoh masyarakat daerah dan telah berjasa bagi daerah.
- (2) Nama jalan lainnya yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama hewan, bunga, tanaman, kota, pulau, gunung, laut, teluk, selat atau kerajaan.
- (3) Nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikombinasikan dengan menambahkan angka romawi.

Pasal 38

Pemberian atau perubahan nama jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemasangan Papan Nama Jalan

Pasal 39

- (1) Setiap jalan daerah wajib memiliki papan nama yang ditempatkan pada pangkal dan ujung jalan.
- (2) Bentuk, warna dan ukuran dari papan nama jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu
Mekanisme dan Tata Cara Pengadaan Tanah

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan konstruksi jalan daerah di atas hak atas tanah orang, dilakukan dengan cara pengadaan tanah.
- (2) Pengadaan tanah diperlukan untuk konstruksi jalan baru, pelebaran jalan, perbaikan alinemen dan penyediaan ruang milik jalan.
- (3) Pengadaan tanah harus mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan dan memiliki dasar hukum.
- (4) Pengadaan tanah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan cara :
 - a. pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; atau
 - b. pencabutan hak atas tanah.

Bagian Kedua
Panitia Pengadaan Tanah

Pasal 41

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan konstruksi jalan daerah dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lain mengenai panitia pengadaan tanah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Musyawarah

Pasal 42

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan konstruksi jalan daerah dilakukan melalui musyawarah untuk memperoleh kesepakatan mengenai pelaksanaan pembangunan pada target lokasi, serta bentuk dan besarnya ganti rugi.
- (2) Musyawarah melibatkan pemegang hak atas tanah beserta panitia pengadaan tanah.
- (3) Apabila dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan maka panitia pengadaan tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi sesuai kesepakatan.
- (4) Ketentuan lain mengenai musyawarah pengadaan tanah berpedoman kepada peraturan pemerintah mengenai pengadaan tanah.

Bagian Keempat Ganti Rugi

Pasal 43

- (1) Ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk hak atas tanah, bangunan dan tanaman.
- (2) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan panitia berdasarkan Pasal 42 ayat (3).

BAB XI

IZIN, DISPENSASI, REKOMENDASI DAN PEMANFAATAN JALAN

Bagian Kesatu

Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan

Paragraf 1

Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang diperbolehkan

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib memperoleh izin.
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan dengan ketentuan :
 - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, serta tidak membahayakan konstruksi jalan;
 - b. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan

Pasal 45

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 yang mengakibatkan penutupan jalan, dapat diberikan apabila terdapat jalan alternatif yang dapat dilewati pengguna lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.

- (3) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan memasang rambu-rambu sementara tentang arah yang diwajibkan dan/atau Papan Penunjuk Jurusan Jalur Alternatif.

Pasal 46

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 yang tidak mengakibatkan penutupan jalan, kepada pemegang izin diwajibkan untuk melengkapi :
 - a. lampu merah di bagian terluar dari bangunan yang digunakan untuk tempat penyelenggaraan kegiatan pada kedua ujung lokasi kegiatan; dan
 - b. alat pembatas yang dapat berupa drum atau kerucut lalu lintas (*traffic cone*) ataupun bahan lainnya yang memiliki warna yang jelas kelihatan pada malam hari oleh pengguna jalan lain yang akan melintasi ruas jalan tersebut.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan petugas yang berwenang di bidang lalu lintas untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

Paragraf 3

Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk bangunan utilitas

Pasal 47

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk penempatan, pembuatan dan pemasangan bangunan utilitas harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan utilitas yang ditetapkan.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak dan sanitasi.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan yang berada di atas atau dibawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar, sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan dan tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (4) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai sifat pelayanan wilayah pada jaringan jalan di luar kota, harus ditempatkan di luar ruang milik jalan.
- (5) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai sifat pelayanan lokal pada jaringan jalan di luar kota dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (6) Rencana penempatan utilitas dan rencana pelaksanaan pekerjaan harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (7) Pemilik utilitas harus menyediakan rambu-rambu pengarah lalu lintas, papan-papan peringatan, pagar pengaman, barikade dan petugas pengatur lalu lintas.

Pasal 48

- (1) Penggalian, penimbunan, pembongkaran bangunan dan penempatan bangunan utilitas serta peralatan yang digunakan harus memperhatikan kepentingan lalu lintas termasuk pejalan kaki, penghuni rumah/bangunan disekitarnya, serta tidak mengganggu kelancaran *drainase*.
- (2) Material galian tidak boleh ditumpuk di pinggir jalan, di atas perkerasan atau di ruang manfaat jalan dan bekas timbunan material galian yang telah diangkut ke tempat penimbunan sementara harus bersih kembali dan tidak mengganggu keamanan dan lingkungan setempat.

- (3) Perbaiki kembali bangunan, halaman atau pagar menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.
- (4) Kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.

Pasal 49

- (1) Apabila utilitas ditempatkan melintang jalan, utilitas harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 1 meter dari permukaan perkerasan jalan.
- (2) Apabila utilitas di tempatkan pada kedalaman kurang dari kedalaman yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka konstruksi utilitas harus memiliki daya dukung terhadap beban struktur jalan dan beban lalu lintas di atasnya.
- (3) Bahan timbunan lapis perkerasan harus menggunakan bahan baru untuk pondasi atas (*base*), pondasi bawah (*sub-base*) dan lapis permukaan (*surface*) dengan mutu, ketebalan, serta daya dukung setelah dipadatkan minimal sama dengan lapis perkerasan sekitarnya dengan memperhatikan estetika dan kenyamanan pengguna jalan.

Paragraf 4

Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk kepentingan lain

Pasal 50

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 untuk kepentingan lain harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan yang ditetapkan.
- (2) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain untuk jalan masuk/keluar persil/pekarangan, komersial dan lahan parkir.
- (3) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. Ketinggian/peil jalan masuk/keluar tidak boleh lebih tinggi dari permukaan badan jalan;
 - b. Apabila di kemudian hari jalan tersebut akan digunakan untuk keperluan jalan dan bangunan lainnya, maka izin akan ditinjau kembali dan bangunan yang ada tidak dimintakan ganti rugi.

Bagian Kedua

Dispensasi Jalan

Paragraf 1

Dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan

Pasal 51

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Bupati.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

Paragraf 2

Mekanisme Dispensasi

Pasal 52

- (1) Untuk melindungi jalan dari kerusakan setiap ruas jalan ditetapkan batas maksimal kemampuan daya dukung jalan atau kekuatan JBB kendaraan bermotor yang dapat melalui ruas jalan daerah.

- (2) Penetapan jalan berdasarkan kemampuan daya dukung atau JBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Penyelenggara jalan wajib memasang rambu-rambu lalu lintas pada lokasi ruas-ruas jalan daerah yang dilarang untuk dilewati kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap kendaraan bermotor dilarang melalui ruas-ruas jalan daerah yang memiliki kemampuan JBB yang lebih rendah dari JBB kendaraan.
- (5) Dalam hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, kendaraan bermotor dengan JBB yang melebihi kemampuan daya dukung dan JBB ruas jalan daerah dapat melalui ruas jalan tertentu setelah dilakukan kajian oleh SKPD yang berwenang dan mendapatkan dispensasi dari Bupati.
- (6) Bupati dapat menolak permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memberikan alasan-alasan dan pertimbangan.

Pasal 53

- (1) Ruas-ruas jalan dalam kota yang dilarang dilalui oleh mobil barang tertentu pada jam-jam tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Dalam hal-hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, serta untuk berlangsungnya kegiatan perekonomian sehari-hari, kendaraan mobil barang dengan JBB 5 ton ke atas sampai dengan JBB 15 ton dapat melalui ruas-ruas jalan dalam kota setelah mendapat izin dispensasi masuk kota oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari SKPD yang berwenang.

Bagian Ketiga

Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 54

- (1) Izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan dikeluarkan oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari SKPD penyelenggara jalan.
- (2) Rekomendasi penyelenggara jalan dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

BAB XII

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur lainnya yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melengkapi dokumen analisis dampak lalu lintas.
- (2) Penyusunan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Masyarakat berhak :
 - a. memberi usulan, saran atau informasi kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan;
 - b. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan;
 - c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan;
 - d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan.

(2) Masyarakat wajib :

- a. menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan; dan
- b. melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 57

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.
- d. merusak, memindahkan dan mencabut papan nama jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan atau memusnahkan papan nama jalan.
- e. melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi jalan tanpa izin.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
 - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin; dan
 - e. pembongkaran.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 57 dikenai pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas sebagai penyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas sebagai penyidik tindak pidana;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 28 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto

HOLLER SINAMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2012 NOMOR 8

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

I. UMUM

Jalan sebagai prasarana transportasi memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan utamanya dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional juga memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan bidang sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu penyelenggaraan jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat memberikan kontribusi semaksimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta dapat mendorong pengembangan daerah sehingga terwujud suatu pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

Untuk mendukung fungsi tersebut jalan harus dapat memenuhi persyaratan keamanan, kecepatan dan kenyamanan. Jalan tidak hanya terdiri dari bagian yang bisa dilalui kendaraan saja melainkan juga bagian lain yang menunjang kesempurnaan jalan diantaranya Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.

Yang dimaksud dengan “keserasian” adalah berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya. Yang dimaksud dengan “keselarasan” adalah berkenaan dengan keterpaduan sektor lain, sedangkan keseimbangan adalah berkenaan dengan keseimbangan antarwilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan termasuk jalan tol yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Yang dimaksud dengan “transparansi” berarti keterbukaan dalam melakukan kegiatan, dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi bahkan dana/budget.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal, keberhasilgunaan adalah berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik dan sinergis.

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Point “c”

Pemerintah desa berhak mendapat pedoman/petunjuk teknis pengelolaan/penyelenggaraan jalan desa dari pemerintah daerah.

Ayat (2) Point “b”

Pemerintah desa wajib berperan serta dalam pemeliharaan dan pembersihan jalan desa termasuk bangunan pendukungnya baik memberikan masukan akan situasi /kondisi jalan desa maupun melakukan kegiatan pemeliharaan dan pembersihan melalui program gotong royong.

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3) Point "a"

Identitas jalan adalah data yang memuat status jalan, ukuran lebar Jalan, kondisi jalan, lebar jalan dan penanganan jalan.

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Status jalan adalah perubahan akibat, perubahan status, daerah yang Dihubungkan oleh ruas jalan tersebut yang dinyatakan sebagai jalan nasional/negara.

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36 Cukup jelas

Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38 Cukup jelas

Pasal 39 Cukup Jelas

Pasal 40 Cukup jelas

Pasal 41 Cukup jelas

Pasal 42 Cukup jelas

Pasal 43 Cukup jelas

Pasal 44 Cukup jelas

Pasal 45 Cukup jelas

Pasal 46 Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Bangunan utilitas adalah bangunan lain yang identitasnya di daerah milik jalan baik di atas permukaan jalan maupun di bawah permukaan jalan, seperti jaringan kabel telekomunikasi, pipa air bersih, pipa gas tekanan tinggi termasuk rambu-rambu lalu lintas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7)

Pemilik utilitas adalah badan/organisasi yang bertanggung jawab atas bangunan utilitas.

Pasal 48 Cukup jelas

Pasal 49 Cukup jelas

Pasal 50 Cukup jelas

Pasal 51 Cukup jelas

Pasal 52 Cukup jelas

Pasal 53 Cukup jelas

Pasal 54 Cukup jelas

Pasal 55 Cukup jelas

Pasal 56 Cukup jelas

Pasal 57 Cukup jelas

Pasal 58 Cukup jelas

Pasal 59 Cukup jelas

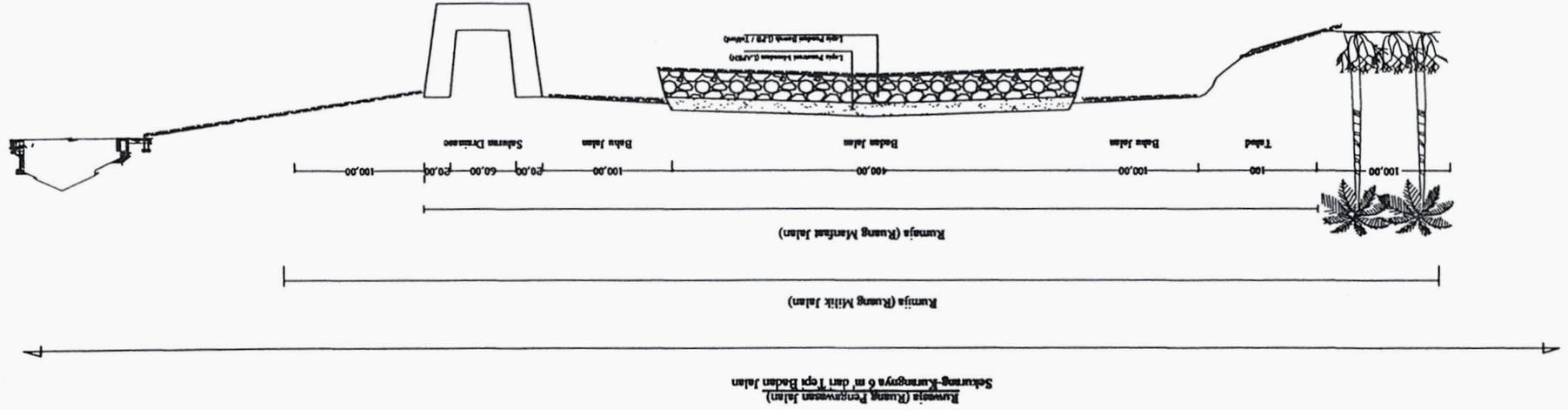
Pasal 60 Cukup jelas

Pasal 61 Cukup jelas

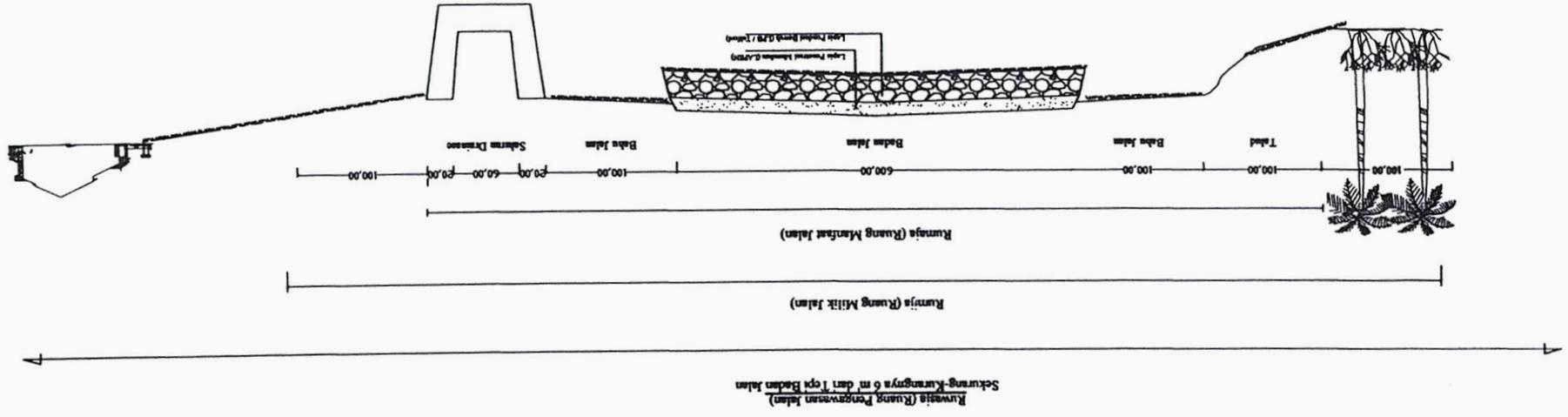
Pasal 62 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 106

SKALA 1 : 100
PENAMPANG MELINTANG JALAN LOKAL DESA



SKALA 1 : 100
PENAMPANG MELINTANG JALAN KOLEKTOR



PENAMPANG MELINTANG JALAN LOKAL SKALA 1 : 100

